

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Studi Kasus Kab/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006-2013)**

Zulfah Dwi Hasnuri

Email: zulfahdwi@gmail.com

Agus Tri Basuki. SE., M.Si

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183
No. Telp : 0274 387649 (hotline), 0274 387656 ext. 199/200 No. Fax : 0274 387649

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Penduduk dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006-2013. Subjek dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Jumlah Kendaraan Bermotor berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Jumlah Penduduk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Jumlah Kendaraan bermotor, Jumlah Penduduk dan Pendapatan Domestik Regional Bruto.

PENDAHULUAN

Membangun masyarakat yang adil dan makmur suatu cita-cita yang luhur, tetapi juga suatu tantangan yang berat. Memang, Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang besar dan sumber daya alam yang memadai, tetapi itu saja belum cukup. Untuk membangun bangsa dan negara yang sebesar ini perlu tindakan yang terarah dan terencana. (T. Gilarso, 2004:331). Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, di antaranya dengan menetapkan UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. (Hadi Soesastro, 2005).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah:

- 1) Pajak Daerah; yaitu pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

- 2) Retribusi Daerah; yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.
- 3) Perusahaan Daerah; Dalam hal ini, laba perusahaan daerahlah yang diharapkan sebagai sumber pemasukan bagi daerah.
- 4) Lain-lain PAD yang sah. Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 156, yang dimaksud dengan Lain-lain PAD yang sah anatara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah.

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor sebagai alat angkut orang atau barang. Pemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, perwakilan lembaga internasional, dikecualikan dari pengenaan pajak kendaraan bermotor. kemudian yang menjadi subyek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Selanjutnya wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. (Suparmoko, 2002:63).

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah dengan pertumbuhan penduduk yang positif. Sehingga pada sektor transportasi mengalami peningkatan, khususnya pada permintaan jumlah kendaraan bermotor baik yang beroda dua maupun roda empat di DIY yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Yogyakarta juga merupakan kota pendidikan yang dipenuhi berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) yang sudah terkemuka. Keadaan tersebut menjadikan Yogyakarta sebagai tempat bagi calon mahasiswa dari berbagai daerah di tanah air untuk meneruskan sekolah di perguruan tinggi. Mahasiswa baru yang meneruskan studinya di Yogyakarta pada umumnya membawa sepeda motor dari daerah asalnya, tetapi tidak sedikit juga mahasiswa baru yang membeli kendaraannya di Yogyakarta. Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahun mengalami peningkatan. Di karenakan dari pemerintah sendiri memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pembayaran kendaraan bermotor. Sebagai contoh pemerintah melalui SAMSAT DIY mengadakan kerja sama dengan Bank BPD DIY membuka tempat layanan samsat online agar memberikan kemudahan kepada masyarakat didalam memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) setiap tahunnya. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Kab/Kota di DIY tahun 2006-2013)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik investment.

Fungsi Pajak

Menurut Thomas Sumarsan, S.E., M.M. (2013) pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Fungsi Penerimaan (Budgetair), Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- 2) Fungsi Mengatur (Regulerend), Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi.

Jenis Pajak

Menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010:5) di Indonesia, jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

Menurut Golongannya

- 1) Pajak langsung, pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
- 2) Pajak tak langsung, pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

Menurut Sifatnya

- 1) Pajak subyektif, pajak yang didasarkan atas keadaan subyeknya, memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya (memperhatikan keadaan Wajib pajak).
- 2) Pajak obyektif, pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak.

Menurut Lembaga Pemungutnya

- 1) Pajak pusat (negara), pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.
- 2) Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

Prinsip Pemungutan Pajak

Menurut Siti Kurnia dan Ely Suhayati (2010) pada abad ke-18, Adam Smith (1723-1790), seorang penulis dan filsuf yang di anggap sebagai bapak aliran ekonomi klasik, dalam bukunya yang terkenal adalah *An Inquiry In to the Nature and Causes of the Wealth of Nation* (Kemakmuran Bangsa-Bangsa) yang ditulis pada tahun 1776 memberikan pedoman bagi peraturan perpajakan, di mana pemungut pajak dalam memungut pajaknya harus membuat peraturan dan mengikuti peraturan tersebut yang memenuhi rasa keadilan, yaitu dengan memenuhi prinsip *Certainty, Equality, Convenience dan Economic (Efisiensi)*. Keempat prinsip tersebut sebagai "*The four canons of Adam Smith*" atau sering juga disebut "*The four Maxims*".

Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Yusdianto Prabowo, S.E. (2006), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil.
- 2) Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak di atur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2.
- 3) Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi ataupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana, sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Tony Marsyahrul (2006), ada tiga (3) sistem pemungutan pajak sebagai berikut:

- 1) Self Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
- 2) Official Assesmet adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang aparaturnya menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang.
- 3) Witholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh seorang wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada UU No. 34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Dasar Pengenaan PKB

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:142), dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok, yaitu:

- 1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual kendaraan Bermotor yang berlaku; dan
- 2) Bobot, yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencermaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Irwansyah Lubis (2010: 94) tarif pengenaan pajak ada beberapa ketentuan yaitu:

- 1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
 - b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama
- 3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, di tetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen)
- 4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- 5) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal & tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah dan dibayar sendiri oleh wajib pajak.
- 2) Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Dokumen lain yang disamakan.
- 3) Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
- 4) Terhadap Wajib Pajak Tersebut dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding sebagai dasar Pemungutan dan Penyetoran Pajak.

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Jumlah Penduduk

Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia (2013) menjabarkan penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi serta usaha untuk membangun suatu perekonomian karena penduduk menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan tenaga usahawan dalam menciptakan kegiatan ekonomi. (Sukimo, 2005 :142).

Jumlah Kendaraan Bermotor

Pengertian kendaraan bermotor Indonesia, menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah: “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”. Dari pengertian kendaraan bermotor di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang mempergunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau sebagai alat transportasi akan tetapi kendaraan tersebut bukan yang berjalan di atas rel seperti kereta api.

Penelitian Terdahulu

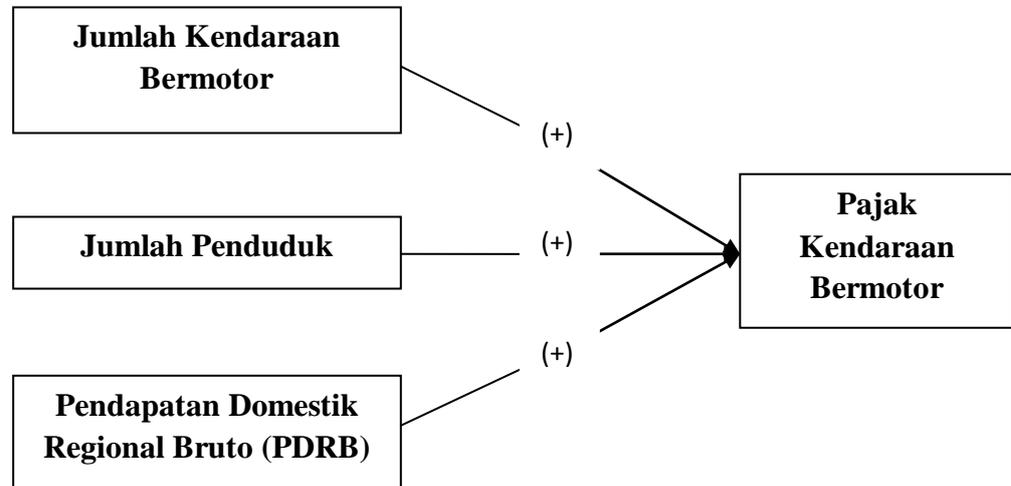
Ni Nyoman Pande Ariasik, dkk (2011), meneliti mengenai Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB per Kapita Terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB serta Kemandirian Keuangan Daerah provinsi Bali Tahun 1991-2010. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (path Analisis), menggunakan data sekunder yang diperoleh pada instansi Pemerintah Provinsi Bali dengan time series dari tahun 1991-2010. Teknik statistik yang digunakan yaitu analisis deskriptif meliputi perhitungan rata-rata, standar deviasi, tabel dan gambar. Memberikan hasil/gambaran dan penjelasan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan jumlah penduduk dan PDRB per kapita terhadap penerimaan PKB dan BBNKB. Jumlah penduduk dan PDRB per kapita tidak berpengaruh langsung terhadap kemandirian keuangan daerah. Jumlah penduduk dan PDRB per kapita berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemandirian keuangan daerah melalui penerimaan PKB dan BBNKB.

Dina Anggraeni (2010), meneliti mengenai Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). (studi empiris pada Provinsi Bengkulu). Penelitian ini menggunakan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan, studi pustaka, time series Analysis. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) ditunjukkan dari nilai probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05 dan R square sebesar 0,926 atau 92,6% sehingga dapat dilihat bahwa 92,6% di pengaruh oleh faktor pajak daerah dan retribusi daerah.

Kerangka Pemikiran

Atas dasar pemikiran teoritis dan beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai berbagai hubungan antara variabel independen: Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Domestik Regional Bruto dengan variabel dependen Pajak Kendaraan Bermotor, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas pada Penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2013, maka faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di 4 Kabupaten dan 1 Kota Madya (Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta) dapat digambarkan dengan pengembangan model sebagai berikut:



Metodelogi Penelitian

Objek Penelitian

Daerah penelitian yang digunakan adalah seluruh kabupaten dan kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota madya yaitu: Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Subjek Penelitian

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : PDRB, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kendaraan Bermotor.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik DIY, DPPKA DIY, serta sumber lain yang terkait dengan penelitian ini.

Definisi Operasional

Definisi operasioanal untuk variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) PKB, Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 19997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada UU No. 34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

- 2) PDRB, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.
- 3) Jumlah Kendaraan Bermotor, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang mempergunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau sebagai alat transportasi akan tetapi kendaraan tersebut bukan yang berjalan di atas rel seperti kereta api.
- 4) Jumlah Penduduk, Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia (2013) menjabarkan penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Alat Analisis

Alat analisis digunakan untuk menjawab permasalahan/hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi Data Panel.

Model Penelitian

Faktor-faktor yang mempengaruhi pajak kendaraan bermotor dapat digambarkan dengan fungsi sebagai berikut :

$$\text{Log PKBit} = \text{Log } \beta_0 + \text{Log } \beta_1 \text{PDRBit} + \text{Log } \beta_2 \text{Jpit} + \text{Log } \beta_3 \text{JKBit} + \mu_{it}$$

Dimana:

Log	: Log-Linier
PKB	: Pajak Kendaraan Bermotor
PDRB	: Pendapatan Domestik Regional Bruto
JP	: Jumlah Penduduk
JKB	: Jumlah Kendaraan Bermotor
i	: cross section
t	: time series
β_0	: konstanta
β_1, β_2, \dots	: koefisien regresi
μ	: error term

Model Analisis

Uji Kualitas Data (Uji Multikolinearitas dan Uji Heterokedastisitas)

Uji Multikolinearitas adalah keadaan dimana antara variabel-variabel bebas dalam model regresi berganda ditemukan adanya korelasi (hubungan) antara satu dengan yang lain. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ini ditemukan adanya korelasi tersebut. Apabila terjadi multikolinearitas, maka koefisien regresi dari variabel bebas akan tidak signifikan dan mempunyai standard error yang tinggi. Semakin kecil korelasi antar variabel bebas, maka model regresi akan semakin baik. (Santoso, 2005).

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas lebih sering terjadi pada data cross section. (Imam Ghazali, 2005: 28).

Model Regresi Data Panel

Data panel merupakan gabungan antara data berkala (time series) dan data individual (cross section). Data panel juga biasa disebut data terkelompok (pooled data), kombinasi berkala (kumpulan data berkala dan individual), data mikropanel, data bujur (longitudinal data atau studi sekian waktu pada sekelompok objek penelitian), analisis riwayat peristiwa (event history analysis atau studi sepanjang waktu dari sekumpulan objek sampai mencapai keberhasilan atau kondisi tertentu) (Setiawan dan Dwi Endah, 2010:180). Menurut Widarjono (2007) Permodelan dengan menggunakan teknik regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga pendekatan alternatif metode pengolahannya yaitu, metode Common Effect (pooled least square), metode Fixed Effect (FE), dan metode Random Effect (RE).

Pengujian Statistik Analisis Regresi (Uji F, Uji T dan Koefisien Determinasi)

Bentuk pengujian Uji F dapat digunakan untuk dapat mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat secara keseluruhan atau secara simultan.

Untuk menguji hipotesis ada atau tidaknya pengaruh variabel independen secara parsial terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor digunakan t-test, yaitu dengan membandingkan signifikansi t-hitung dan signifikansi t-tabel dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$).

Koefisien determinasi (Goodness of Fit), yang dinotasikan dengan R merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. (Nachrowi D. Nachrowi, 2006).

Analisis Dan Pembahasan

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dari pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang sangat potensial dan sebagai sumber penerimaan utama yang setiap tahunnya mengalami peningkatann akibat meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di DIY.

Rincian target dan realisasi pajak kendaraan bermotor Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2006-2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel

Pajak Kendaraan Bermotor Target dan Realisasi di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006-2013

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor		
	Target	Realisasi	Persentase
2006	Rp. 138.123.360.000	Rp. 171.133.825.500	123.89
2007	Rp. 171.324.990.700	Rp. 199.750.813.670	116.59
2008	Rp. 200.623.161.000	Rp. 223.878.224.250	111.59
2009	Rp. 232.505.419.000	Rp. 258.278.414.295	111.08
2010	Rp. 260.489.549.000	Rp. 280.867.269.350	107.82
2011	Rp. 297.380.000.000	Rp. 331.553.251.935	111.49
2012	Rp. 366.932.000.000	Rp. 393.214.211.600	107.16
2013	Rp. 449.704.920.000	Rp. 458.210.055.800	101.89

Sumber: DPPKA DIY

Dapat di lihat dari tabel di atas target pajak kendaraan bermotor (PKB) pada tahun 2006 mencapai Rp. 138.123.360.000, dengan realisasi sebesar Rp. 171.133.825.500. Realisasi penerimaan pendapatan daerah dari PKB merupakan kumulatif dari sejumlah Kabupaten/Kota meliputi Yogyakarta, Bantul, Sleman, Gunungkidul, dan Kulonprogo.

Jumlah Kendaraan Bermotor

Jumlah kendaraan bermotor di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahunnya mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel

Jumlah Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta dari Tahun 2006 – 2013

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor
2006	862.510
2007	921.909
2008	1.023.423
2009	1.059.481
2010	1.120.907
2011	1.211.257
2012	1.270.236
2013	1.396.967

Sumber: DPPKA DIY

Dapat di lihat dari tabel di atas Jumlah Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini juga disebabkan banyaknya pelajar dari luar yang membeli kendaraan pribadi di Yogyakarta. Di tahun 2006 jumlah kendaraan bermotor di DIY sebanyak 862,510 unit. Dan hingga di Tahun 2013 jumlah kendaraan bermotor meningkat pesat sebanyak 1,396,967 unit.

Jumlah Penduduk

Dengan meningkatnya penambahan penduduk, terutama yang didominasi kalangan mahasiswa, bertambah pula jumlah kendaraan yang ada di wilayah DIY. Berikut tabel mengenai jumlah penduduk di DIY yang tercatat di BPS.

Tabel

Jumlah penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2006-2013

Tahun	Kabupaten/Kota				
	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Yogyakarta
2006	382.661	859.729	675.140	1.015.521	392.799
2007	384.326	872.866	675.359	1.035.032	391.821
2008	385.937	886.061	675.471	1.054.751	390.783
2009	387.493	899.312	675.474	1.074.673	389.685
2010	388.869	911.503	675.382	1.093.110	388.627
2011	390.207	921.263	677.998	1.107.304	390.553
2012	393.221	927.958	684.740	1.114.833	394.012
2013	394.155	943.659	681.936	1.139.438	391.032

Sumber: BPS

Berdasarkan hasil data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 jumlah penduduk DIY mencapai 3.514.764 jiwa. Penduduk tersebut tersebar di lima kabupaten/kota dengan populasi terbesar terdapat di kabupaten Sleman dan diikuti oleh Kabupaten Bantul dan Gunungkidul. Pada Tahun 2013, populasi penduduk yang tinggal di Kabupaten Sleman sebanyak 1139438 jiwa dari seluruh penduduk DIY dan di Bantul sebanyak 943659 jiwa. Sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan Kota Yogyakarta dihuni oleh 391032 jiwa penduduk dari seluruh populasi penduduk DIY.

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi DIY jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa relatif masih rendah. Bahkan lebih rendah daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari jumlah PDRB di setiap Kabupaten/Kota di DIY dibawah ini sebagai berikut:

Tabel
Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (dalam jutaan rupiah) di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 200-2013

TAHUN	KABUPATEN/ KOTA				
	Kulonprogo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Yogyakarta
2006	4.075.586	3.732.268	4.141.652	5.240.006	10.269.336
2007	4.239.955	3.845.008	4.292.535	5.408.815	10.587.919
2008	4.435.553	3976.712	4.470.621	5.612.511	10.989.241
2009	4.460.219	4203.156	4.733.514	5.675.733	13.459.208
2010	4.580.532	4.353.170	4.930.661	5.830.338	14.167.677
2011	4.790.630	4.534.212	5.124.333	6.054.435	14.893.159
2012	4.992.175	4.741.941	5.319.628	6.341.065	15.612.923
2013	5.081.535	4.881.478	5.524.358	6.425.021	16.828.448

Sumber: BPS

Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di tahun 2006 – 2013 yang dipresentasikan oleh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan kinerja semakin membaik. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya nilai PDRB DIY setiap tahunnya, yakni pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp. 38.740.841.857.143 triliun. Sedangkan di tahun 2012 sebesar Rp. 37.007.732.000.000 triliun. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penyumbang PDRB terbesar adalah Kota Yogyakarta dan diikuti Kabupaten Sleman dan Kabupaten GunungKidul. Pada Tahun 2013 PDRB di Kota Yogyakarta sebesar Rp. 16.828.448.000.000. Sedangkan di Kabupaten Sleman sebesar Rp. 6.425.021.000.000, dan Kabupaten GunungKidul sebesar Rp. 5.524.358.000.000.

Hasil Analisis dan Pembahasan

Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan uji park, nilai probabilitas dari semua variabel indenpenden tidak signifikan pada tingkat 1%. Keadaan ini menunjukkan bahwa adanya varian yang sama atau terjadi homoskedastisitas antara nilai-nilai variabel independen dengan residual setiap variabel itu sendiri ($\text{Var } U_i = \sigma_u^2$). Berikut ini output hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Park yang ditunjukkan pada Tabel dibawah ini:

Tabel
Uji Heterokedastisitas dengan Uji Park

Variable	Prob.
C	0.9167
LOGJK?	0.3490
LOGJP?	0.8395
LOGPDRB?	0.5152

Ket. ***-signifikan 1%, **-signifikan 5%, *-signifikan 10%

Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sebagai variabel independen terbebas dari masalah heterokedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan lampiran, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat adanya multikolinearitas antara variabel independen. Hal ini terlihat dari tidak adanya koefisien korelasi antar variabel yang lebih besar dari [0,9].

Analisis Model Data Panel

Pemilihan model ini menggunakan uji analisis terbaik selengkapnya disajikan dalam table berikut :

Tabel
Hasil Estimasi Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Penduduk, dan PDRB terhadap Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta

Variabel Dependen : PDRB	Model		
	Common Effect	Fixed Effect	Random Effect
Konstanta	-1.27672	-1.276728	-18.49937
Standar error	1.310196	1.310196	1.742575
Probabilitas	0.3363	0.3363	0.0000
Jumlah Kendaraan Bermotor	1.202947	1.202947	1.157953
Standar error	0.065204	0.065204	0.046739
Probabilitas	0.0000	0.0000	0.0000
Jumlah Penduduk	0.057048	0.057048	2.050272
Standar error	0.100087	0.100087	0.258972
Probabilitas	0.5722	0.5722	0.0000
PDRB	0.409788	0.409788	0.871671
Standar error	0.084609	0.084609	0.065457
Probabilitas	0.0000	0.0000	0.0000
R²	0.983698	0.983698	0.997298
F_{statistik}	724.0903	724.0903	1687.147
Probabilitas	0.000000	0.000000	0.000000
Durbin-Watson Stat	0.553465	0.553465	1.523458

Sumber : Data diolah

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan dari kedua analisis yang dilakukan yaitu dengan menggunakan *uji likelihood* dan *hausman test* keduanya menyarankan untuk menggunakan *fixed effect*, dan dari perbandingan uji pemilihan terbaik maka model regresi yang digunakan dalam mengestimasi Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Penduduk, dan PDRB terhadap Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah *random effect model*. Dipilihnya *random effect model* karena memiliki probabilitas masing-masing variabel independen dari *random effect model* lebih signifikan dibanding *fixed effect model* atau *common effect model* yang masing-masing variabel independennya tidak signifikan semua sehingga model yang lebih baik yaitu *random effect model*.

Uji Chow

Pemilihan metode data panel untuk seluruh sampel data dengan menggunakan Uji Chow adalah sebagai berikut :

**Tabel
Uji Chow**

Effects Test	d.f.	Prob
Cross-section F	(4,32)	0.0000
Cross-section Chi-square	4	0.0000

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kedua nilai probabilitas Cross Section F dan Chi Square adalah 0,0000 yang lebih kecil dari Alpha 0,05 sehingga kita menolak hipotesis nol. jadi, untuk uji Chow, model yang terbaik (pemilihan) adalah model dengan metode Fixed Effect.

Uji Hausman

Pemilihan metode data panel untuk seluruh sampel data dengan menggunakan Uji Hausman adalah sebagai berikut:

**Tabel
Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. d.f.	Prob
Cross-section random	3	0.0000

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Prob. Cross Section Random sebesar 0.0000 lebih kecil daripada Alpha 0,05 sehingga dengan demikian kita menolak hipotesis nol sehingga model terbaik yang kita dapat setelah pemilihan dan pemilihan adalah model dengan metode Fixed Effect.

Hasil Estimasi Model Data Panel

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan serta dari perbandingan nilai terbaik maka model regresi yang digunakan ialah *random effect model*. Berikut tabel yang menunjukkan hasil estimasi data dengan jumlah observasi sebanyak 5 kabupaten selama periode 2006-2012 (6 tahun).

Tabel 4.10
Hasil Estimasi Model

Variabel	Model
Dependen : PDRB	Random Effect
Konstanta	-18.49937
Standar error	1.742575
Probabilitas	0.0000
Jumlah Kendaraan Bermotor	1.157953
Standar error	0.046739
Probabilitas	0.0000
Jumlah Penduduk	2.050272
Standar error	0.258972
Probabilitas	0.0000
PDRB	0.871671
Standar error	0.065457
Probabilitas	0.0000
R²	0.997298
F_{statistik}	1687.147
Probabilitas	0.000000
Durbin-Watson Stat	1.523458

Sumber: Data diolah

Dari tabel diatas, maka dapat dibuat model analisis data panel terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) disetiap kabupaten dan kota di DIY yang diinterpretasikan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{PKB Bantul} &= -0.245587 \text{ (efek wilayah)} + \text{efek waktu} - 18.49937 + 1.157953 * \text{JK Bantul} + 2.050272 * \text{JP Bantul} + 0.871671 * \text{PDRB Bantul} \\
 \text{PKB GunungKidul} &= -0.022534 \text{ (efek wilayah)} + \text{efek waktu} - 18.49937 + 1.157953 * \text{JK Gunungkidul} + 2.050272 * \text{JP Gunungkidul} + 0.871671 * \text{PDRB Gunungkidul} \\
 \text{PKB KulonProgo} &= 0.475987 \text{ (efek wilayah)} + \text{efek waktu} - 18.49937 + 1.157953 * \text{JK Kulonprogo} + 2.050272 * \text{JP Kulonprogo} + 0.871671 * \text{PDRB Kulonprogo} \\
 \text{PKB Sleman} &= -0.447241 \text{ (efek wilayah)} + \text{efek waktu} - 18.49937 + 1.157953 * \text{JK Sleman} + 2.050272 * \text{JP Sleman} + 0.871671 * \text{PDRB Sleman} \\
 \text{PKB Yogyakarta} &= -0.239375 \text{ (efek wilayah)} + \text{efek waktu} - 18.49937 + 1.157953 * \text{JK Yogyakarta} + 2.050272 * \text{JP Yogyakarta} + 0.871671 * \text{PDRB Yogyakarta}
 \end{aligned}$$

Pada model estimasi diatas, nampak bahwa adanya pengaruh variabel *cross-section* yang berbeda disetiap kabupaten dan kota yang ada di DIY terhadap PKB (Pajak Kendaraan Berrmotor) kabupaten dan kota di DIY. Dimana Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, dan Sleman, memiliki pengaruh efek *cross-section* (efek wilayah) yang bernilai masing-masing

Negatif, yaitu masing – masing wilayah memiliki nilai koefisien sebesar -0.245587 (Kabupaten Bantul), -0.022534 (Kabupaten Gunung Kidul), -0.447241 (Kabupaten Sleman). Sementara itu di Kulon Progo dan Kota Yogyakarta masing-masing wilayah memiliki efek *cross-section* (efek wilayah) yang bernilai positif, yaitu 0.475987 untuk Kabupaten Kulon Progo dan 0.239375 untuk Kota Yogyakarta.

Selain itu adanya penambahan efek waktu dalam model analisis juga memberikan pengaruh yang berbeda-beda setiap tahunnya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota DIY. Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien variabel waktu yang tidak sama disetiap tahunnya (*tabel 4.10*). Tahun 2006 memiliki efek waktu sebesar -0.012087 mengalami efek waktu yang negative karena mengalami gempa bumi di tahun 2006 sehingga proses penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami negative. Sedangkan pada tahun 2007 mengalami efek waktu positif sebesar 0.008613, sedangkan ditahun 2008 mengalami efek waktu negatif sebesar -0.013346 hal ini dikarenakan di tahun 2008 mengalami krisis di Amerika Serikat hal ini berdampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pada tahun 2009 mengalami efek waktu negatif sebesar -0.001096 hal ini dikarenakan masih terasa dampak adanya krisis di tahun 2008. Sedangkan di tahun 2010 mengalami efek waktu negatif sebesar -0.009474 hal ini dikarenakan di tahun 2010 di Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi erupsi merapi sehingga berdampak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan di tahun 2011 mengalami efek waktu yang bernilai negatif sebesar -0.008627 dikarenakan pasca pemulihan adanya erupsi merapi. Dan di tahun 2012 dan 2013 mengalami efek waktu yang bernilai positif sebesar 0.019252 dan 0.016765.

Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil regresi dari pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Domestik Regional Bruto terhadap Pajak Kendaraan Bermotor di DIY per kabupaten dan kota 2006 sampai tahun 2013 yang terlihat pada tabel di atas diperoleh nilai R^2 dengan pendekatan *random effect model* sebesar 0.997298. hal ini berarti bahwa 99.72% variasi variabel pajak kendaraan bermotor di DIY mampu dijelaskan oleh himpunan variasi variabel independen jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk dan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Sedangkan sisanya 0.28% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model.

Uji Signifikansi Bersama-sama (Uji Statistik F)

Uji F dimaksudkan untuk melihat ada tidaknya pengaruh bersama-sama yaitu jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, dan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) terhadap pajak kendaraan bermotor di DIY per kabupaten dan kota tahun 2006-2013 dengan menggunakan *random effect model* nilai probabilitasnya yaitu 0.000000 (signifikan pada 5%) artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji statistik t)

Uji statistik t bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut disajikan tabel uji statistik t jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk dan PDRB terhadap pajak kendaraan bermotor tahun 2006-2013.

Tabel
Uji Statistik t

Variabel	Koefisien Regresi	Prob	Standart Prob
Jumlah kendaraan bermotor (JK)	1.157953	0.0000	5%
Jumlah Penduduk (JP)	2.050272	0.0000	5%
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)	0.871671	0.0000	5%

Sumber : Data Badan Pusat Statistik yang sudah diolah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa koefisien regresi untuk variabel Jumlah kendaraan bermotor sebesar 1.157953 dengan probabilitas 0.0000 signifikan pada $\alpha = 5\%$. Jadi dapat diketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan berpengaruh secara signifikan $\alpha = 5\%$ terhadap pajak kendaraan bermotor di DIY. Variabel Jumlah penduduk dengan koefisien regresi sebesar 2.050272 dengan probabilitas 0.0000 signifikan pada $\alpha = 5\%$. Jadi dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan berpengaruh secara signifikan $\alpha = 5\%$ terhadap pajak kendaraan bermotor di DIY. Variabel PDRB dengan koefisien regresi sebesar 0.871671 dengan probabilitas 0.0000 signifikan pada $\alpha = 5\%$. Jadi dapat diketahui bahwa PDRB berpengaruh positif dan berpengaruh secara signifikan $\alpha = 5\%$ terhadap pajak kendaraan bermotor di DIY.

Kesimpulan, Saran dan Keterbatasan Penelitian

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, dan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2006-2013 yang diukur dengan menggunakan beberapa variabel independen yaitu jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk dan produk domestik regional bruto (PDRB), maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis antara lain sebagai berikut:

- 1) Variabel jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gazi, Zara Herzya (2008), adanya hubungan yang positif antara jumlah kendaraan bermotor dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang membuktikan bahwa semakin meningkatnya jumlah kendaraan di DIY maka akan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di DIY.
- 2) Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di DIY. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Pande Ariasih, dkk (2011) yang menyatakan bahwa adanya hubungan positif antara jumlah penduduk dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor di DIY, sehingga dapat dibuktikan bahwa penduduk berperan dalam perekonomian, maka semakin tingginya jumlah penduduk di DIY akan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di DIY.

- 3) Variabel pendapatan domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di DIY. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Reza Hariyudha (2009), yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, sehingga dengan meningkatnya PDRB maka akan semakin tinggi pula tingkat ekonomi daerah.

Selain variabel independen di atas, terdapat dua variabel boneka (dummy variabel), yaitu variabel *cross section* (efek wilayah) dan *time* (efek waktu) yang dimasukkan dalam model dan berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di DIY. Sehingga dengan adanya variabel boneka dalam model didapatkan model terbaik dalam analisis dengan nilai *R-square* sebesar 0.997298 yang berarti bahwa adanya kombinasi variabel independen memiliki pengaruh sebesar 99,97% terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di DIY. Sementara itu, dari hasil uji Multikolinieritas dan uji Heteroskedastisitas tidak ditemukan adanya penyimpangan asumsi Klasik, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan bebas dari masalah korelasi antar variabel independen dan ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan dan pengamat yang lain.

Saran

Setelah melakukan penelitian yang disertai dengan pembahasan dan perumusan kesimpulan, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian sebagai bahan untuk dijadikan masukan dan pertimbangan yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

- 1) Penulis menyarankan agar lembaga pemerintah membuat kebijakan dalam penerapan pajak atau dilakukan pengenaan denda yang diperbesar bagi wajib pajak sehingga jika ada keterlambatan pembayaran pajak yang melebihi ketentuan waktu diasumsikan satu bulan sehingga pada bulan berikutnya jika wajib pajak belum menjalankan kewajiban membayar pajak dianggap lalai dalam melaksanakan kewajibannya.
- 2) Bagi kantor samsat dan dinas pendapatan daerah agar lebih meningkatkan pengawasan kepada wajib pajak serta meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan samsat keliling dengan cara memperbanyak samsat keliling di tiap wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di DIY. Serta memperluas kerja sama yang sudah ada dengan Bank BPD DIY dan membuka tempat berbagai objek tempat layanan agar memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.
- 3) Penulis juga memberikan saran bagi penelitian-penelitian selanjutnya untuk melakukan tindak lanjut penelitian khususnya mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2006 – 2013.

Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian di antaranya penulis mendapatkan kesulitan karena terbatasnya referensi yang membahas mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di DIY dan keterbatasan waktu penulis dalam mencari bahan-bahan penelitian ini.